

Public – Privat Partnership (PPP) Sebagai Salah Satu Upaya dalam Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Negara Berkembang (Indonesia)

Tantangan Indonesia sebagai negara berkembang yang mampu bersaing dengan negara – negara lainnya adalah bagaimana Indonesia dapat mengatasi masalah pembangunan Infrastruktur. Kenapa yang diukur harus Infrastruktur? Karena Infrastruktur merupakan hal yang penting bagi sebuah negara baik negara maju maupun negara berkembang, dan perlu diketahui bahwa penilaian terhadap sebuah negara yang dinilai salah satunya adalah infrastruktur. Kemudian bagaimana cara yang dapat dilakukan Indonesia menyikapi hal tersebut? Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara Kerjasama antar Pemerintah dan Swasta.

Kerjasama antar Pemerintah dan Swasta ataus sering disebut dengan PPP merupakan menurut William J. Parente dari USAID *Publik Private Partenership* (PPP) adalah *an agreement or contract, between a publik entity and a private party, under which: a) private party undertakes government function for specified period of time, b) the private party receives compensation for performing the function, directly or idirectly, c) private party is liable for the risks arising from performing the function and, d) the publik facilities, land or other resources may be transferred or made available to the private party.* Dari definisi tersebut PPP merupakan bentuk perjanjian atau kontrak antara sektor publik dan sektor privat yang terdiri atas beberapa ketentuan, antara lain: sektor privat menjalankan fungsi pemerintah untuk periode tertentu; sektor privat menerima kompensasi atas penyelenggaraan fungsi, baik secara langsung maupun tidak langsung; sektor privat bertanggung jawab atas resiko yang timbul dari penyelenggaraan fungsi tersebut. Jadi, dalam PPP terdapat pengurangan/reduksi aktivitas atau kepemilikan pemerintah dalam suatu pelayanan atau industri tertentu dikarenakan sektor privat (swasta) berpartisipasi dalam penyediaan layanan (*service delivery*).

Konsep PPP dapat dijadikan sebagai alternatif penyediaan infrastruktur. Publik Private Partnership dapat memunculkan hubungan antara publik dan private untuk bekerjasama dalam pembangunan. Keuntungan yang dapat diperoleh pada hubungan ini adalah inovasi, kemudahan keuangan, kemampuan teknologi, dan pengaturan efisiensi.

Salah satu bentuk PPP yang sering digunakan adalah **Build Operate Transfer (BOT)**. **BOT** atau kontrak antara instansi pemerintah dan badan usaha/swasta (*special purpose company*), dimana badan usaha bertanggung jawab atas desain akhir, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan(O&M) sebuah proyek investasi bidang infrastruktur selama beberapa tahun; biasanya dengan transfer aset pada akhir masa kontrak. Umumnya, masa kontrak berlaku antara 20 sampai 30 tahun setelah masa kontrak habis aset akan dikembalikan ke pemerintah.

Salah satu penerapan BOT adalah pembangunan jalan tol. Dalam Pembangunan Jalan Tol, Penyetujuan pembangunan jalan tol dilakukan oleh pemerintah akan tetapi pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan oleh pihak swasta dengan masa kontrak sesuai dengan kesepakatan akan dikembalikan kepada Pemerintah lagi. Dengan sistem ini pemerintah lebih untung dibandingkan pemerintah membangun jalan sendiri yang dalam pembangunannya sering tak pernah luput dari kata “hutang”. Penerapan sistem BOT ini mungkin dapat menjawab tantangan utama pembangunan infrastruktur Indonesia nantinya. Salah satu tantangan utama yang penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah bagaimana cara pembangunan Infrastruktur di 3 area penting (Menurut Jack H.Knott) yaitu pertama di Pelabuhan karena pelabuhan memiliki arti penting bagi Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Kedua, masalah elektrifikasi yang mendukung bagian dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang Ketiga adalah penanganan infrastruktur untuk penanggulangan banjir.

Dalam menghadapi tantangan tersebut Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta (sektor privat) dan mungkin yang sering terkendala pada regulasi dan sistem. Serta perlunya koordinasi antar pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota sehingga dalam kerjasama ini nantinya tidak ada tumpang tindih dalam kekuasaan. Pemerintah punya resource untuk melakukan kerja sama dengan sektor privat, banyak dari sektor privat mereka yang mau menanamkan investasi di Indonesia. Banyak pemilik modal yang datang ke Indonesia. Tetapi, masalah utama ada di pemerintah. Ketidakpastian investasi, masalah regulasi dan mengenai bagaimana kerja sama dengan sektor privat untuk pembangunan tetapi persoalannya ada pada ketidakpastian tersebut. Jika pemerintah fokus pada membuat investasi lebih mudah serta mengurangi ketidakpastian tersebut dan menjadikannya efektif, prospeknya akan positif untuk Indonesia ke depan. Ini juga didukung oleh catatan Indonesia yang cukup baik dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan terwujud ketika ada kerjasama antara pemerintah, sektor privat dalam investasi. Kerja sama dengan sektor privat mampu membuat tujuan tersebut tercapai sehingga cara tersebut lebih efektif dan akan menjadi tren yang penting. Tanpa itu, pemerintah butuh banyak dana untuk pembangunan. Pemerintah perlu jeli melihat peluang di tahun-tahun mendatang sehingga proyek pembangunan dapat dipercepat dan dapat tercapai dalam hal infrastruktur untuk menuju Infrastruktur Indonesia yang lebih baik

Author : Erlina, Regional and Urban Planning